

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023

<https://soppengkab.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SOPPENG**





**INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN  
RAKYAT  
KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2023**



<mailto:info@soppengkab.go.id>



<https://soppengkab.bps.go.id>

# Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Soppeng 2023

*Public Welfare Statistics of Soppeng Regency 2023*

**ISSN/ISBN** : -

**No. Publikasi**/*Publication Number*: 73120.2320

**Katalog**/*Catalog*: 4102004.7312

**Ukuran Buku**/*Book Size*: 17,6 X 25 cm

**Jumlah Halaman**/*Number of Pages*: xx + 66 halaman/*pages*

**Naskah**/*Manuscript*:

BPS Kabupaten Soppeng/*BPS-Statistics Soppeng Regency*

**Penyunting**/*Editor*:

BPS Kabupaten Soppeng/*BPS-Statistics Soppeng Regency*

**Desain Cover oleh**/*Cover Designed by*:

BPS Kabupaten Soppeng/*BPS-Statistics Soppeng Regency*

**Ilustrasi Cover**/*Cover Illustration*:-

**Penerbit**/*Published by*:

BPS Kabupaten Soppeng/*BPS-Statistics Soppeng Regency*

**Pencetak**/*Printed by*:

CV. Areso

**Sumber Ilustrasi**/*Graphics by*: -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggangdakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia*

# Tim Penyusun

**Pembina:**

Muhlis, SE, M.Si

**Penulis:**

Ananda Ahada Sya'airillah, S.ST

**Penyunting:**

Refina Oktafiani, SST

**Desain Cover:**

Ananda Ahada Sya'airillah, S.ST

**Desain Layout**

Ananda Ahada Sya'airillah, S.ST

## Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Soppeng 2023 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Soppeng. Selain itu, publikasi ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain; Indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut secara umum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat di Kabupaten Soppeng.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Watansoppeng, November 2023  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Soppeng



Muhlis, SE, M.Si  
NIP. 19661231 198903 1 013

<https://soppengkab.bps.go.id>



## Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
Istilah Teknis.....	xv
Bab I Pendahuluan.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Sumber Data.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
Bab II Kependudukan.....	9
2.1. Piramida Penduduk.....	10
2.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	11
2.3. Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	12
2.4. Status Perkawinan.....	14
Bab III Keluarga Berencana.....	19
Bab IV Pendidikan.....	23
4.1. Status Pendidikan.....	24
4.1.1. Indikator Daya Tampung Sekolah.....	25
4.1.2. Indikator Kecukupan Tenaga Pendidik.....	26
4.2. Partisipasi Sekolah.....	27
4.2.1. Angka Partisipasi Sekolah.....	27
4.2.2. Angka Partisipasi Murni.....	30
4.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	311

Bab V Kesehatan.....	35
5.1. Derajat Kesehatan Masyarakat .....	36
5.2. Status Kesehatan Masyarakat .....	38
5.3. Status Kesehatan Masyarakat .....	40
5.4. Tenaga Kesehatan.....	41
Bab VI Perumahan .....	45
6.1. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal .....	46
6.2. Sumber Air .....	47
6.3. Fasilitas Buang Air Besar .....	48
Bab VII Lain-Lain .....	53
7.1. Pengeluaran per Kapita Sebulan dan Pola Konsumsi Penduduk .....	54
7.2. Penduduk Miskin.....	55
Lampiran .....	61

## Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Soppeng, 2020-2023 .....	11
Tabel 2. Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2023.....	13
Tabel 3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Soppeng, 2022 .....	14
Tabel 4. Persentase Wanita Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun menurut Partisipasi KB di Kabupaten Soppeng, 2018-2022 .....	20
Tabel 5. Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid Terhadap Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023 .....	26
Tabel 6. Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023 .....	26

<https://soppengkab.bps.go.id>

## Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. Piramida Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2023 .....	10
Gambar 2. Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun menurut Status Perkawinan di Kabupaten Soppeng, 2022.....	15
Gambar 3. Jumlah Sarana Pendidikan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng, 2021/2022 dan 2022/2023 .....	24
Gambar 4. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur di Kabupaten Soppeng, 2018-2022 .....	28
Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng, 2022 .....	29
Gambar 6. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng, 2022 .....	300
Gambar 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Soppeng, 2022.....	31
Gambar 8. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, 2018-2022.....	36
Gambar 9. Persentase Persalinan menurut Penolong Persalinan Pertama di Kabupaten Soppeng, 2018-2022.....	37
Gambar 10. Angka Kesakitan ( <i>Morbidity Rate</i> ) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2022.....	39
Gambar 11. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng, 2022 .....	40
Gambar 12. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Soppeng, 2022 .....	41
Gambar 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Soppeng Tahun, 2022.....	46
Gambar 14. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Soppeng, 2022 .....	47
Gambar 15. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Buang Air Besar yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2022.....	48
Gambar 16. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Fasilitas Buang Air Besar yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2022.....	49

Gambar 17. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Tinja yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2022 .....	50
Gambar 18. Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2022 .....	54
Gambar 19. Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng, 2018-2022 .....	56
Gambar 20. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng, 2018-2022 .....	56

<https://soppengkab.bps.go.id>

## Daftar Lampiran

Lampiran 1. Beberapa Indikator Kependudukan Kabupaten Soppeng, 2020-2023 .....	61
Lampiran 2. Beberapa Indikator Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, 2018-2022 .....	62
Lampiran 3. Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Soppeng, 2019/2022-2022/2023 .....	63
Lampiran 4. Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020-2022	64
Lampiran 5. Beberapa Indikator Perumahan Kabupaten Soppeng, 2020-2022 .....	65
Lampiran 6. Beberapa Indikator Lainnya Kabupaten Soppeng, 2020-2022.....	66

<https://soppengkab.bps.go.id>



## Istilah Teknis

### **Kependudukan**

#### **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Perkembangan atau penambahan penduduk dalam kurun waktu tertentu, dan interpretasinya bahwa semakin kecil angka ini maka semakin mencerminkan kesuksesan penanganan/pengendalian jumlah penduduk.

#### **Kepadatan Penduduk**

Angka yang menggambarkan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Angka ini diinterpretasikan bahwa semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin padat penduduknya

#### **Angka Beban Ketergantungan (ABK)**

Perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas)

#### **Rasio Jenis Kelamin (RJK)**

Rasio antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya perempuan dikalikan 100. Interpretasinya: bahwa apabila angka ini menunjukkan angka lebih dari 100, maka penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan

#### **Status Perkawinan**

**Kawin** adalah berada dalam ikatan perkawinan baik secara hukum adat, agama, negara dan sebagainya, maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri.

**Cerai hidup** adalah berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Perempuan yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

**Cerai mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

### **Keluarga Berencana (KB)**

#### **Metode Kontrasepsi**

Cara/alat pencegah kehamilan, baik secara modern maupun secara tradisional.

#### **Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)**

Orang yang mengikuti/memakai salah satu metode kontrasepsi.

### **Pendidikan**

#### **Rasio Murid-Sekolah (RMS)**

Angka yang mencerminkan daya tampung per sekolah atau menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan

#### **Rasio Murid-Guru (RMG)**

Angka yang menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar atau dengan kata lain memperlihatkan mutu pengajaran/pengawasan dan perhatian guru di kelas.

#### **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Perbandingan antara penduduk yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umurnya dengan jumlah penduduk pada umur tingkat pendidikan masing-masing. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan serta menunjukkan banyaknya penduduk yang menerima pendidikan pada suatu tingkat tertentu.

### **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Proporsi murid yang bersekolah pada suatu tingkat pendidikan tertentu dalam kelompok umurnya (tepat waktu) terhadap jumlah penduduk kelompok umur pendidikan tersebut

## **Kesehatan**

### **Umur Harapan Hidup Saat Lahir**

Jumlah tahun yang dapat diharapkan seseorang masih hidup saat lahir. Angka ini mencerminkan status kesehatan penduduk atau keadaan sosial ekonomi penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Interpretasi, semakin tinggi Umur Harapan Hidup Saat Lahir maka semakin berhasil pembangunan dibidang sosial ekonomi suatu daerah terutama dibidang Kesehatan

### **Angka Kesakitan/*Morbidity Rate* (MR)**

Proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah maupun kegiatan sehari-hari terhadap keseluruhan penduduk yang ada di wilayah tersebut.

### **Keluhan Kesehatan**

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau lain hal

### **Sakit/terganggu kesehatan**

Sakit/terganggu kesehatan adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya karena sakit tersebut.

## **Perumahan**

### **Air Leding**

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Air pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

### **Leher Angsa**

Kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

### **Tangki**

Tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton, baik mempunyai bak resapan maupun tidak.

## **Lain-Lain**

### **Kemiskinan**

Keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak atau tidak dapat terpenuhinya kebutuhan minimum untuk pangan, perumahan, kesehatan dan Pendidikan

### **Penduduk Miskin**

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan atau penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan

### **Garis Kemiskinan**

Nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan

### **Pengeluaran per Kapita per Bulan**

Rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>



# BAB I PENDAHULUAN

<https://soppeng.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>



# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada umumnya yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia yang sering disebut dengan kesejahteraan, melalui usaha-usaha di berbagai bidang salah satunya dalam bidang sosial. Kesejahteraan yang dimaksud tidak saja menyangkut kemampuan pemenuhan kebutuhan yang bersifat materiil, tetapi juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat nonmateriil. Kebutuhan materiil diantaranya adalah sandang, pangan, dan perumahan, sedangkan kebutuhan nonmateriil diantaranya pendidikan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Ukuran kesejahteraan hingga saat ini masih sulit untuk diketahui dan menjadi perdebatan karena kesejahteraan menyangkut segala sendi kehidupan manusia.

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, dan pengukuran keberhasilan suatu tahap pembangunan diperlukan indikator sosial yang sering disebut sebagai indikator kesejahteraan rakyat. Indikator ini merupakan pelengkap dari indikator ekonomi yang diharapkan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat.

### 1.2. Ruang Lingkup

Kesejahteraan mencakup kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan berbagai unsur kualitas kehidupan. Dalam pengertian yang luas, sangat tidak mungkin menyajikan data statistik yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Indikator yang disajikan dalam publikasi ini merupakan indikator yang dapat diukur (*measurable welfare*).

Oleh karena itu, statistik sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Soppeng 2023 dimana data-data pada publikasi ini juga akan dibandingkan dengan data-data pada tahun-tahun sebelumnya sehingga pada periode tersebut dapat diketahui perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Soppeng.

### **1.3. Sumber Data**

Badan Pusat Statistik melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional untuk mendapatkan informasi mengenai kesejahteraan penduduk yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat antara lain melalui data kependudukan, fertilitas dan Keluarga Berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lain-lain. Selain itu, dikumpulkan juga data pendukung dari dinas/instansi terkait yang diambil dari publikasi Kabupaten Soppeng dalam Angka.

Ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dan ekonomi dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, persentase akseptor KB, persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih atau telah menikmati listrik, rata-rata pengeluaran sebulan dan lain sebagainya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Soppeng Tahun 2023 disusun dalam delapan bab yang dilengkapi dengan tabel dan grafik dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, ruang lingkup, sumber data dan sistematika penulisan.

## **BAB II KEPENDUDUKAN**

Memuat piramida penduduk, jumlah dan pertumbuhan penduduk, kelompok umur dan jenis kelamin, serta status perkawinan.

## **BAB III KELUARGA BERENCANA**

Memuat pemakaian alat/cara KB.

## **BAB IV PENDIDIKAN**

Memuat sarana pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

## **BAB V KESEHATAN**

Memuat derajat kesehatan masyarakat, status kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

## **BAB VI PERUMAHAN**

Memuat status penguasaan bangunan tempat tinggal, sumber air, dan fasilitas buang air besar.

## **BAB VII LAIN-LAIN**

Memuat pengeluaran per kapita sebulan dan pola konsumsi penduduk, serta penduduk miskin.

<https://soppengkab.bps.go.id>



# BAB II

# KEPENDUDUKAN

<https://soppen.kab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

## **Bab II**

# **Kependudukan**

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk dipandang sebagai salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya merupakan sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pembangunan itu sendiri. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya, tidak hanya yang bersifat mengendalikannya saja.

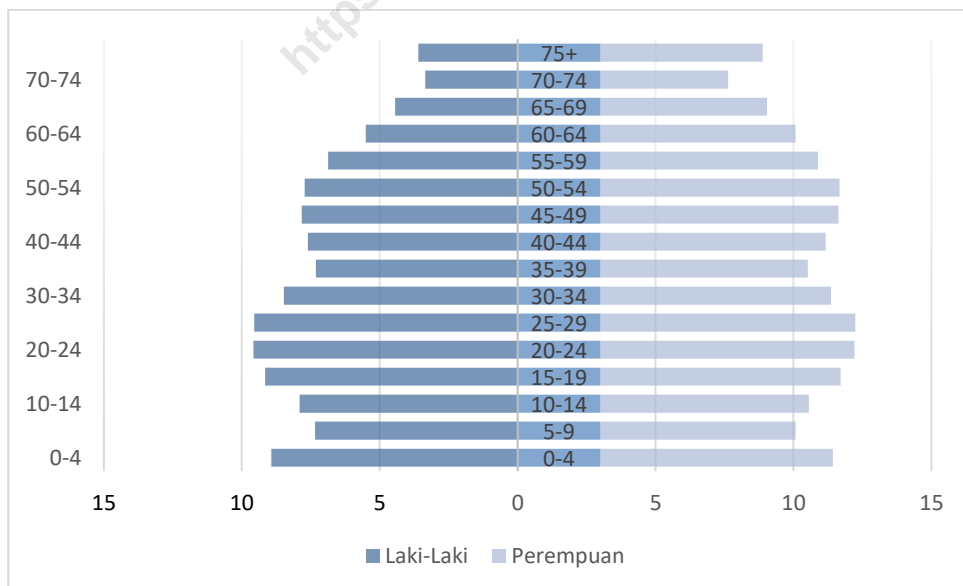
Sejalan dengan itu, diperlukan data-data kependudukan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung setiap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas penduduk. Hal tersebut sangat penting mengingat jumlah penduduk yang besar dan selalu bertambah diharapkan tidak hanya menjadi beban dalam pembangunan, tetapi juga menjadi potensi dalam mendukung pembangunan itu sendiri.

Pemerintah sangat membutuhkan data kependudukan dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Di sisi lain, para pelaku bisnis juga memerlukan data kependudukan untuk keperluan perencanaan produksi, pemasaran, dan rekrutmen pekerja/karyawan. Begitu juga dengan lembaga swasta nonprofit dan lembaga-lembaga lainnya, data sangat dibutuhkan sebagai bahan analisis untuk memecahkan suatu masalah-masalah tertentu.

## 2.1. Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah ilustrasi grafis yang menggambarkan distribusi dari berbagai kelompok umur dalam populasi manusia di suatu wilayah. Piramida penduduk digambarkan dalam dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam interval kelompok umur penduduk lima tahunan.

Piramida penduduk sering dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk ilustrasi grafis yang menggambarkan umur dan distribusi jenis kelamin penduduk. Berdasarkan gambar piramida penduduk tersebut, secara sekilas dapat diketahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan, dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan. Piramida penduduk Kabupaten Soppeng dapat digambarkan melalui Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Piramida Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2035



Berdasarkan Gambar 1, bentuk piramida penduduk Kabupaten Soppeng adalah piramida penduduk ekspansif. Piramida ekspansif menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar yang berarti, angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Daerah dengan piramida ekspansif memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat.

## 2.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng hasil Proyeksi Penduduk mencapai 238,24 ribu jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 115,18 ribu jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 123,06 ribu jiwa. Apabila diporsorsikan, maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, atau 51,65 persen dibanding 48,35 persen.

Salah satu indikator kependudukan yang dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 orang penduduk perempuan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Soppeng, 2020-2023

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	113,08	121,67	234,75	92,94	-
2021	113,81	122,15	235,96	93,17	0,52
2022	114,51	122,61	237,12	93,39	0,49
2023	<b>115,18</b>	<b>123,06</b>	<b>238,24</b>	<b>93,60</b>	0,47

Sumber: *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk*

Berdasarkan Tabel 1, rasio jenis kelamin Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 adalah 93,6. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, dari 100 orang penduduk perempuan yang ada di Kabupaten Soppeng terdapat sekitar 93 atau 94 orang penduduk laki-laki. Apabila dibandingkan dalam empat tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2023, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Soppeng selalu di atas angka 92.

Penduduk Kabupaten Soppeng setiap tahun selalu bertambah jumlahnya. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Soppeng selalu positif. Hal ini sejalan dengan bentuk piramida penduduk Kabupaten Soppeng pada Gambar 1 yang bertipe ekspansif. Tentunya pertumbuhan penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran, tetapi juga dipengaruhi adanya angka kematian dan perpindahan atau migrasi penduduk dari dan keluar Kabupaten Soppeng.

### **2.3. Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Salah satu indikator kependudukan yang sangat penting adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi atau struktur penduduk dapat dilihat dari jenis kelamin dan dapat juga dilihat dari struktur umur serta kombinasi antara keduanya. Keduanya memiliki arti strategis dalam hubungannya dengan berbagai aspek kependudukan lainnya seperti fertilitas, mortalitas, migrasi dan masalah-masalah ketenagakerjaan. Indikator ini dapat digunakan untuk memprioritaskan kebijakan yang perlu diambil dalam suatu wilayah tertentu.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi atau rendahnya tingkat kelahiran dan dapat mencerminkan Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *dependency ratio*. Angka Beban Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka Beban Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan Tabel 2 berikut, pada tahun 2023 dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Soppeng yang berusia muda (0-14 tahun) mencapai 17,35 ribu jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan angka kelahiran selama tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Soppeng tercatat mencapai 163,11 ribu jiwa pada tahun 2023 dimana angka tersebut mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya berjumlah 162,72 ribu jiwa. Penduduk usia tua (65 tahun ke atas) pada tahun 2023 juga tercatat mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni mencapai 27,92 ribu jiwa atau sekitar 11,72 persen.

Tabel 2. Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Soppeng 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	234,75	235,96	237,12	238,24
0-14 tahun (Ribuan Jiwa)	15,46	16,17	16,82	17,35
15-64 tahun (Ribuan Jiwa)	161,58	162,20	162,72	163,11
65+ tahun (Ribuan Jiwa)	26,00	26,62	27,27	27,92
Persentase Lansia (65+)	11,07	11,28	11,50	11,72
Angka Beban Ketergantungan	25,66	26,38	27,10	27,75

Sumber: *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2035*  
*Hasil Sensus Penduduk*

Beberapa ahli demografi menyatakan bahwa suatu wilayah yang angka beban ketergantungannya dibawah 50 maka wilayah tersebut masuk pada fase bonus demografi. Bonus Demografi merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan bagi pembangunan dikarenakan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas). Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2020-2023, penduduk Kabupaten Soppeng telah sampai pada fase bonus demografi tersebut.

## 2.4. Status Perkawinan

Salah satu karakteristik penduduk yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi yaitu status perkawinan. Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati. Badan Pusat Statistik mendefinisikan penduduk yang berstatus kawin yaitu penduduk yang berada dalam ikatan perkawinan baik secara hukum adat, agama, negara dan sebagainya, maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri.

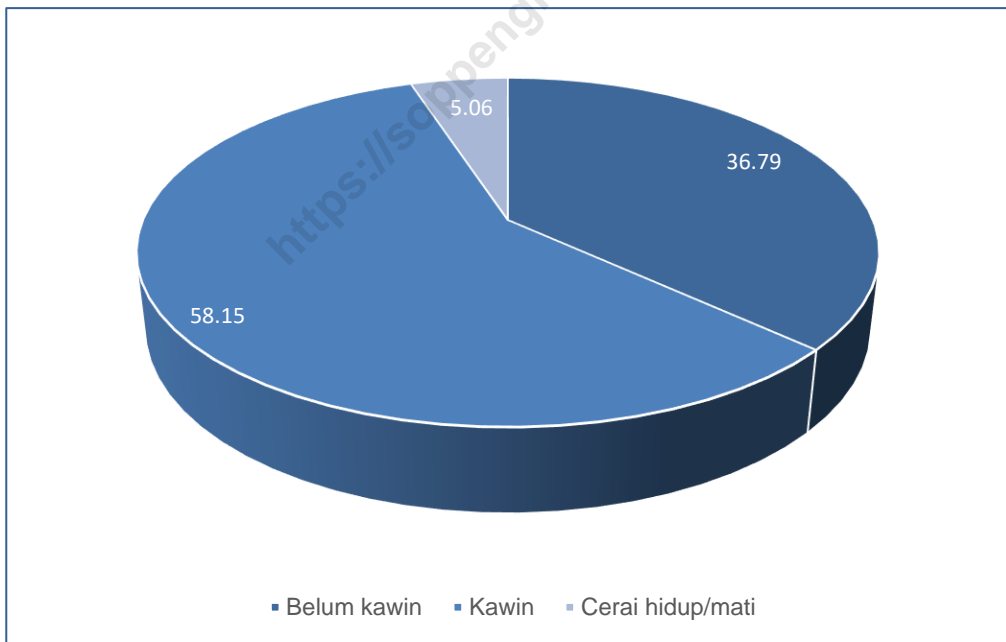
Tabel 3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Soppeng, 2022

Status Perkawinan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	35,45	25,71	30,34
Kawin	57,55	53,33	55,34
Cerai	7,00	20,96	14,32
Soppeng	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Soppeng yang berumur 10 tahun ke atas pada tahun 2022 sebagian besar berstatus kawin, yakni sebesar 55,34 persen, sedangkan yang berstatus belum kawin ada sebanyak 30,34 persen dan sisanya berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati). Apabila dilihat pada status perkawinan cerai, dapat diketahui sebuah fenomena bahwa lebih banyak penduduk umur 10 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan yang berstatus cerai dibandingkan penduduk umur 10 tahun ke atas berjenis kelamin laki-laki yang berstatus cerai. Perbandingannya mencapai 20,96 persen dibanding 7 persen.

Apabila karakteristik status perkawinan penduduk perempuan dilihat pada kelompok umur 15-49 tahun, dapat diketahui bahwa persentase yang berstatus kawin lebih tinggi dibandingkan dengan yang berstatus tidak kawin (belum kawin dan cerai).



Gambar 2. Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun menurut Status Perkawinan di Kabupaten Soppeng, 2022

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Berdasarkan Gambar 2 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 58,15 persen perempuan yang berstatus kawin dari total perempuan umur 15-49 tahun di Kabupaten Soppeng pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan penduduk perempuan umur 10 tahun ke atas, persentase yang berstatus kawin tersebut lebih besar. Hal ini dikarenakan pada penduduk berjenis kelamin perempuan, secara spesifik umur 15-49 tahun merupakan usia subur bagi perempuan yang merupakan usia produktif untuk menghasilkan keturunan. Sementara apabila dilihat pada umur 10 tahun ke atas, umur 10-14 tahun dan umur 50 tahun ke atas bukan lagi merupakan usia subur bagi perempuan untuk menghasilkan keturunan.

<https://soppengkab.bps.go.id>



**BAB III**  
**KELUARGA**  
**BERENCANA**

<https://pembengalbps.co.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>



## **Bab III**

# **Keluarga Berencana**

Fertilitas dalam demografi didefinisikan sebagai kemampuan seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup. Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan). Fertilitas dapat dipengaruhi oleh keadaan dari perempuan itu sendiri yakni secara kodrati perempuanlah yang mengalami reproduksi. Keadaan perempuan tersebut diantaranya ditinjau dari usia, tingkat pendidikan, usia perkawinan pertama, penggunaan alat kontrasepsi dan lain-lain. BPS membatasi pada wanita pernah kawin berusia 15 hingga 49 tahun dikarenakan usia tersebut merupakan usia subur bagi seorang perempuan sehingga kemungkinan seorang perempuan dapat melahirkan anak cukup besar dalam rentang usia tersebut.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan tingkat fertilitas. Kebijakan tersebut diantaranya dengan pemberian batasan usia pernikahan dan program Keluarga Berencana (KB).

Pemberian batasan usia pernikahan dimaksudkan agar wanita menunda usia perkawinan mereka sehingga dapat memperpendek masa reproduksinya. Perempuan yang kawin pada usia yang terlalu muda cenderung berisiko lebih tinggi selama masa kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan perempuan yang sudah berada pada usia matang (lebih dari 20 tahun). Risiko selama kehamilan dan persalinan akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dengan menunda usia kawin diharapkan wanita dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi atau pun bekerja sehingga memiliki bekal yang cukup, baik material maupun spiritual untuk berumah tangga kelak.

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan yaitu dapat berupa kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh salah satunya dengan cara pemakaian alat/cara kontrasepsi KB.

Berdasarkan Tabel 4 berikut, dapat diketahui bahwa persentase wanita pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah atau sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2022 mencapai 62,35 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, persentasenya cenderung mengalami pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran serta partisipasi wanita pernah kawin umur 15-49 tahun dalam mensukseskan progam KB cenderung mengalami mengalami pertumbuhan.

Tabel 4. Persentase Wanita Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun menurut Partisipasi KB di Kabupaten Soppeng, 2018-2022

Partisipasi KB	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pernah Menggunakan	21,12	19,81	22,84	14,60	19,83
Sedang Menggunakan	40,45	40,56	41,99	43,69	42,52
Tidak Pernah Menggunakan	38,43	39,63	35,17	41,71	37,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022



# BAB IV PENDIDIKAN

<https://soppenteknibps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

## **Bab IV**

### **Pendidikan**

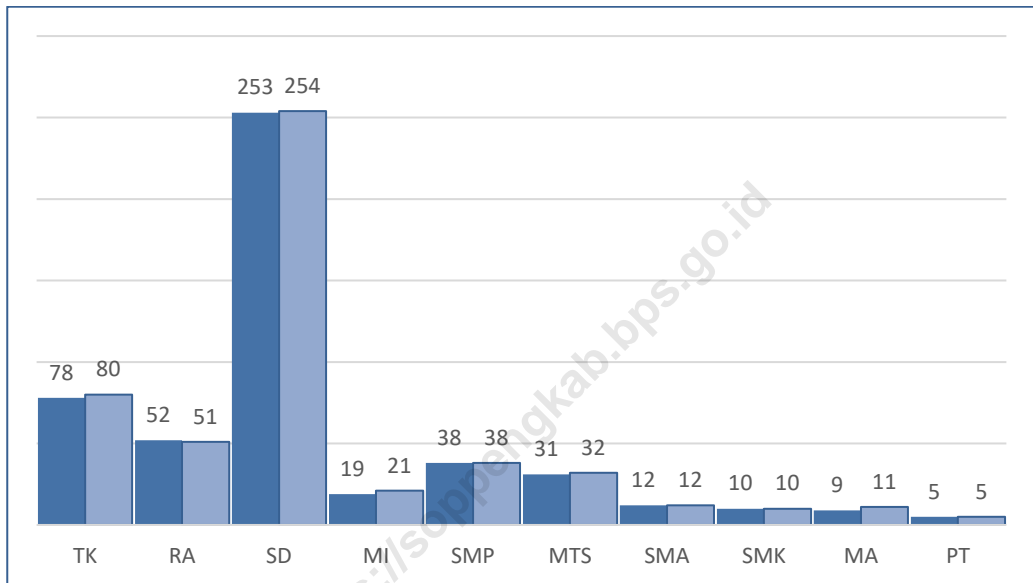
Kedudukan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan saat ini bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pembangunan fisik tidak dapat meninggalkan pembangunan manusia sebagai mesin penggerakannya. Kualitas SDM yang tersedia menentukan tingkat apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dicanangkan bersama. Cara utama untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan berkualitas, berkesinambungan dan merata.

Pendidikan merupakan kebutuhan dan usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan harus menjadi stimulus bagi manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri yang pada akhirnya secara makro akan meningkatkan perekonomian maupun ketahanan nasional. Sedemikian penting pendidikan sehingga UUD 1945 mengamanatkan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Soppeng sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Arah kebijakan peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan dilaksanakan melalui beberapa hal antara lain penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas pendukungnya, penyediaan berbagai alternatif pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, serta penyediaan berbagai beasiswa dan bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

#### 4.1. Status Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Jumlah yang cukup dan akses yang mudah dicapai akan memberi dorongan bagi penduduk untuk menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat yang tertinggi.



Gambar 3. Jumlah Sarana Pendidikan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng 2021/2022 dan 2022/2023

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2023

Pada tahun ajaran 2022/2023, di Kabupaten Soppeng terdapat 275 Sekolah Dasar yang terdiri atas 254 unit Sekolah Dasar dan 21 unit Madrasah Ibtidaiyah. Jumlah Sekolah Menengah Pertama mencapai 70 sekolah terdiri dari 38 unit Sekolah Menengah Pertama dan 32 unit Madrasah Tsanawiyah. Sementara itu, jumlah Sekolah Menengah Atas ada sebanyak 33 unit sekolah yang terdiri dari 12 unit Sekolah Menengah Atas, 10 unit Sekolah Menengah Kejuruan dan 11 unit Madrasah Aliyah. Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Soppeng sejumlah 5 perguruan tinggi.

#### **4.1.1. Indikator Daya Tampung Sekolah**

Rasio Murid Sekolah pada setiap tingkat pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Rasio Murid Sekolah menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap tingkat pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat perlu atau tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap tingkat pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan yang memadai.

Rasio Murid Sekolah untuk tingkat pendidikan SD/ sederajat mengalami penurunan. Jika pada tahun ajaran 2021/2022, Rasio Murid Sekolah adalah 75,88, pada tahun ajaran 2022/2023 menurun menjadi 73,15. Penurunan juga terjadi pada jenjang SMA/ sederajat dimana Rasio Murid Sekolah jenjang SMA/ sederajat tahun ajaran 2021/2022 sebesar 312,29 turun menjadi 290,52 untuk tahun ajaran 2022/2023. Penurunan Rasio Murid Sekolah disebabkan oleh adanya penurunan jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat dan SMA/ sederajat pada tahun ajaran 2022/2023.

Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, Rasio Murid Sekolah mengalami peningkatan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran 2021/2022, Rasio Murid Sekolah untuk tingkat SMP/ sederajat sebesar 148,72 naik menjadi 150,54 untuk tahun ajaran 2022/2023.

Tabel 5. Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid Terhadap Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023

Jenjang Pendidikan	2021/2022			2022/2023		
	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Rasio Murid Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Rasio Murid Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/ Sederajat	20 638	272	75,88	20 117	275	73,15
SMP/ Sederajat	10 262	69	148,72	10 538	70	150,54
SMA/ Sederajat	9 681	31	312,29	9 587	33	290,52

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2023

#### 4.1.2. Indikator Kecukupan Tenaga Pendidik

Selain dari sarana yang memadai, hasil kualitas pendidikan juga ditentukan oleh proses yang dijalani. Proses pendidikan akan berjalan baik apabila interaksi antara murid dan guru berjalan lancar. Apabila jumlah murid yang dibimbing oleh seorang guru terlalu banyak, maka interaksi dan komunikasi yang terjalin akan kurang maksimal. Rasio Murid Guru merupakan indikator yang dapat menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas.

Tabel 6. Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023

Jenjang Pendidikan	2021/2022			2022/2023		
	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/ Sederajat	20 638	2 791	7,39	20 117	2 972	7.21
SMP/ Sederajat	10 262	1 280	8,02	10 538	1 244	8.47
SMA/ Sederajat	9 681	934	10,37	9 587	936	10.24

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2023



Rasio Murid Guru pada tingkat pendidikan SD/ sederajat pada tahun ajaran 2022/2023 adalah 7,21. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap guru mengajar sekitar 7 sampai dengan 8 murid pada tingkat SD/ Sederajat untuk tahun ajaran 2022/2023. Pada tahun ajaran yang sama, untuk tingkat SMP/ sederajat, setiap guru mengajar sekitar 8 sampai 9 murid, sedangkan untuk jenjang SMA/ sederajat setiap guru mengajar sekitar 10 hingga 11 murid.

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa kualitas pendidikan yang dilihat dari aspek kecukupan tenaga pendidik pada jenjang SD/ sederajat lebih tinggi dibandingkan jenjang lainnya. Hal tersebut diindikasikan dari lebih rendahnya angka Rasio Murid Guru jenjang SD/ sederajat jika dibandingkan dengan jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat.

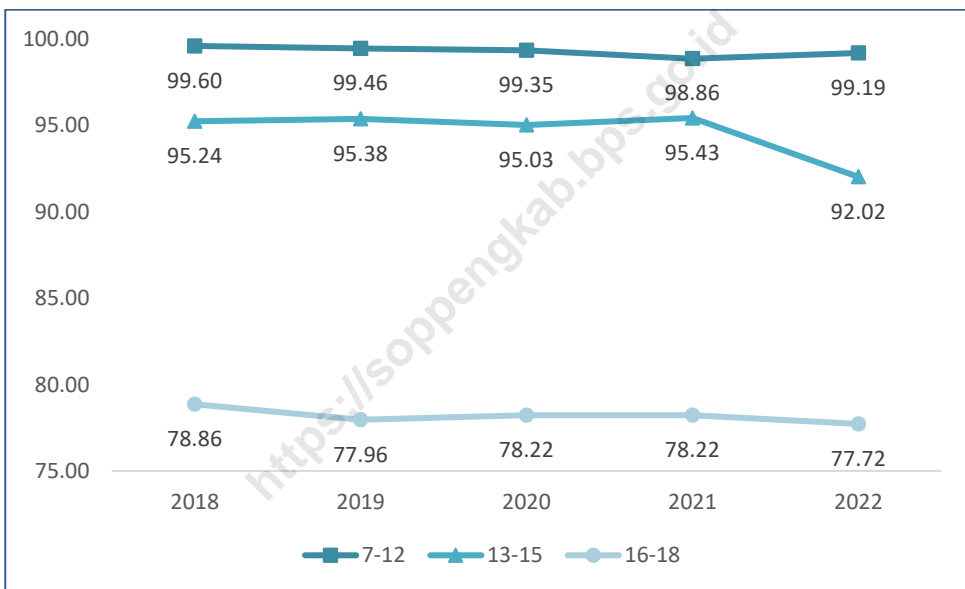
## **4.2. Partisipasi Sekolah**

Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar UUD. Dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, disertai kesadaran akan pentingnya pendidikan, pemerintah pusat dan daerah senantiasa berupaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia. Berbagai program dicanangkan antara lain Gerakan Wajib Belajar 9 Tahun, Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Beasiswa Bidik Misi. Untuk mengetahui keberhasilan program-program tersebut, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah.

### **4.2.1. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi Angka Partisipasi Sekolah berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah mempunyai keunggulan dapat mencerminkan partisipasi/akses pendidikan sesuai kelompok usia sekolah sehingga jelas menggambarkan seberapa besar penduduk yang sedang menikmati pendidikan. Akan tetapi, kelemahan Angka Partisipasi Sekolah adalah tidak dapat melihat di jenjang apa seseorang tersebut bersekolah/nikmati pendidikan.

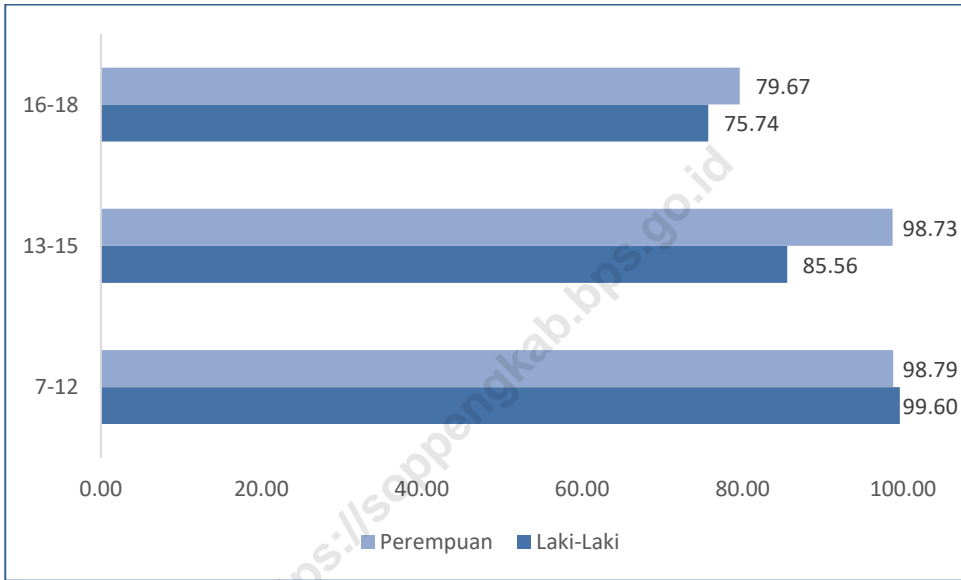


Gambar 4. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur di Kabupaten Soppeng, 2018-2022

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022

Dalam kurun waktu 2018-2022, pada kelompok umur 7-12 tahun terjadi perubahan Angka Partisipasi Sekolah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12 tahun adalah 99,60 persen, terus mengalami penurunan hingga tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 99,19 persen pada tahun 2022. Hal yang berbeda terjadi pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun dimana Angka Partisipasi Sekolah dari tahun 2018 hingga 2022 cukup fluktuatif.

Beberapa hal yang dapat digarisbawahi yaitu semakin tinggi kelompok usianya maka semakin kecil Angka Partisipasi Sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sekolah untuk kelompok usia 16-18 tahun lebih rendah dari kelompok usia 13-15 tahun dan 7-12 tahun. Selain itu, pada tahun 2022, partisipasi sekolah untuk kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng, 2022

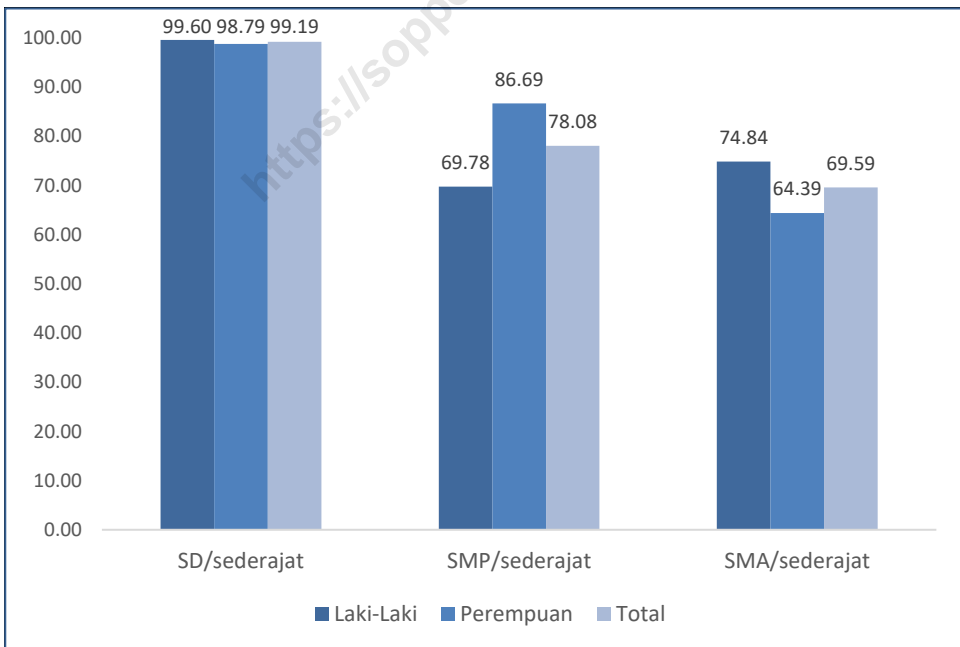
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Angka Partisipasi Sekolah dapat dibedakan juga menurut jenis kelamin. Berdasarkan Gambar 5, Angka Partisipasi Sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan Angka Partisipasi Sekolah laki-laki untuk kelompok umur 7-12 tahun. Sementara itu pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun Angka Partisipasi Sekolah laki-Laki lebih rendah dibandingkan Angka Partisipasi Sekolah perempuan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anak perempuan usia 7-12 masih lebih rendah partisipasinya untuk bersekolah dibandingkan anak laki-laki di kelompok umur yang sama. Secara garis besar, hasil Survei

Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa semakin tinggi kelompok umur seseorang, maka semakin tinggi partisipasinya dalam mengakses pendidikan.

#### 4.2.2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Angka Partisipasi Murni juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis jenjang pendidikan yaitu jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, Angka Partisipasi Murni juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.



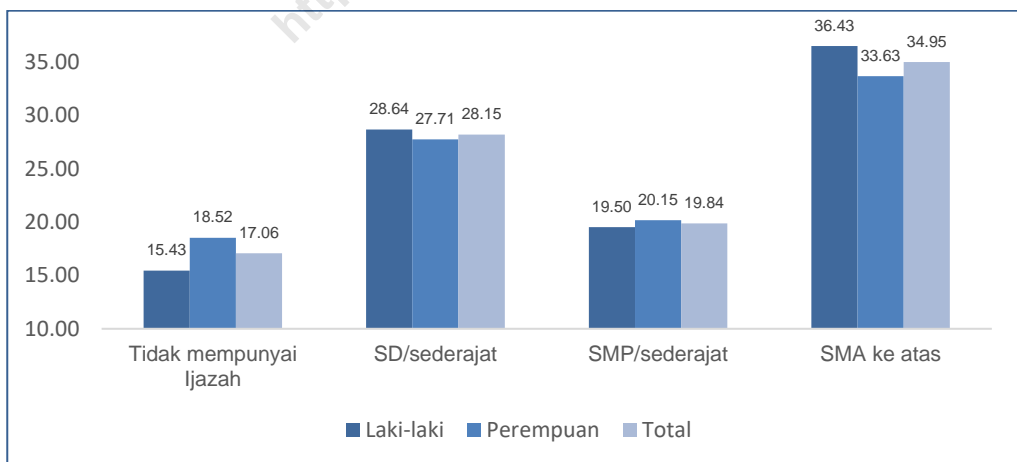
Gambar 6. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng, 2022

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan apabila dilihat dari karakteristik jenis kelamin. Angka Partisipasi Murni untuk SD/Sederajat secara keseluruhan mencapai angka 99,19 persen yang artinya sebanyak 99,19 persen anak sekolah SD/Sederajat menunjukkan kesesuaian dengan penduduk usia 7-12 tahun yang sedang duduk di bangku SD/Sederajat. Begitu juga dengan jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Pada jenjang SD/Sederajat dan SMA/Sederajat diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni penduduk laki-laki lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Selain itu apabila dibandingkan antar jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah Angka Partisipasi Murni.

#### 4.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan.



Gambar 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Soppeng, 2022

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Berdasarkan Gambar 7, diketahui bahwa pada tahun 2022, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng berpendidikan terakhir paling tinggi adalah SD/Sederajat dan/atau SMA/Sederajat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD atau tidak menamatkan pendidikan di tingkat dasar masih di atas 15 persen. Angka tersebut menunjukkan besarnya angka putus sekolah terlebih terkait program Wajib Belajar yang seharusnya bisa menamatkan pendidikannya hingga jenjang SMP/ sederajat.

<https://soppengkab.bps.go.id>



# BAB V KESEHATAN

<https://soppensykb.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>



## **Bab V**

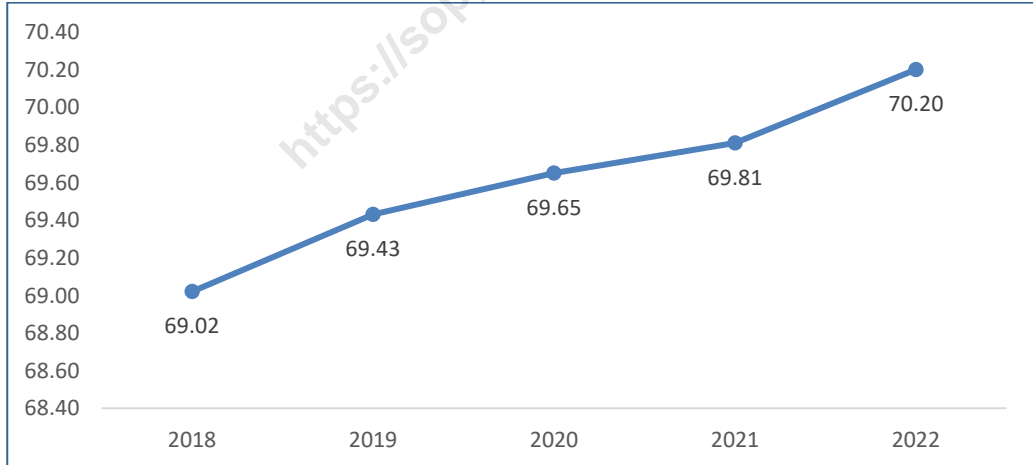
# **Kesehatan**

Kondisi kesehatan memberikan pengaruh yang besar bagi kualitas Sumber Daya Manusia pada umumnya. Gambaran tersebut secara nyata dapat diperoleh dari potret kegiatan masyarakat sehari-hari. Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan optimal dibandingkan bila kesehatannya sedang terganggu. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi setiap manusia yang akan mempengaruhi kualitas kehidupannya.

Tingkat kesehatan penduduk berkaitan dengan tingkat kesejahteraannya sehingga pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesejahteraan. Pembangunan dalam bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku hidup sehat serta penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, pondok bersalin desa (polindes) dan masih banyak lagi dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan bidang yang lain.

## 5.1. Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan. Dengan adanya derajat kesehatan, akan tergambar masalah kesehatan yang sedang dihadapi suatu wilayah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain faktor keturunan/genetis, pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan. Umur Harapan Hidup disebut juga lama hidup seseorang/ sekelompok orang yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Selain itu, Umur Harapan Hidup merupakan suatu alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.



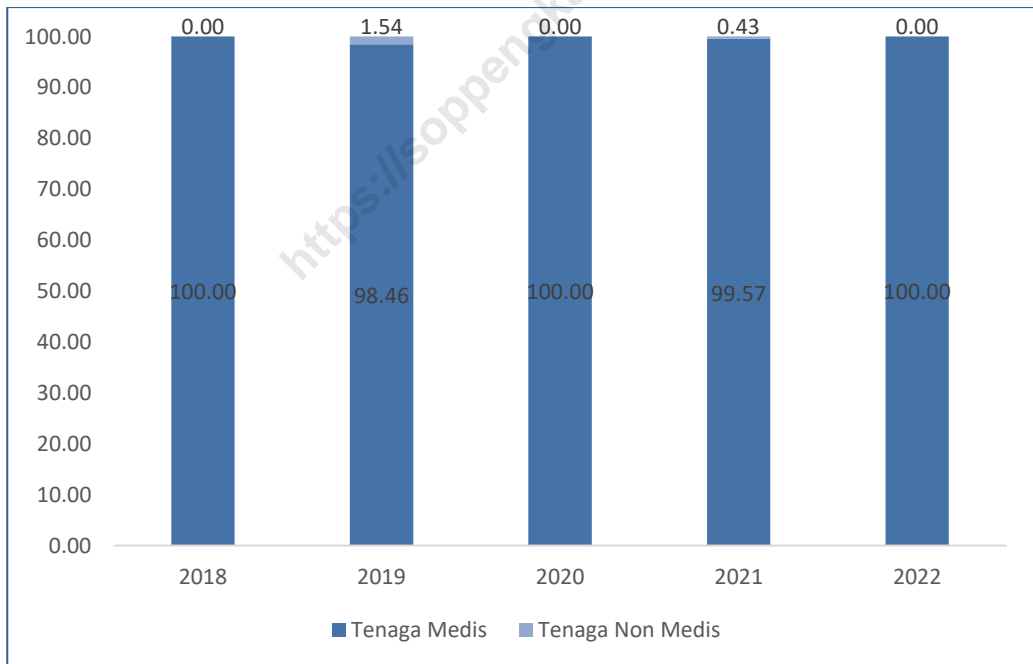
Gambar 8. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, 2018- 2022

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022

Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng pada dalam rentang tahun 2018-2022 menunjukkan tren naik. Pada tahun 2018, Umur Harapan Hidup menunjukkan nilai 69,02 meningkat menjadi 69,43 pada tahun 2019, dan terus

meningkat menjadi 70,20 pada tahun 2022. Hal tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata lama hidup penduduk Kabupaten Soppeng sampai meninggal yaitu kurang lebih pada usia 69 sampai 70 tahun. Naiknya angka Umur Harapan Hidup dalam lima tahun terakhir mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Umur Harapan Hidup diartikan sebagai perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Umur Harapan Hidup dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi dan anak karena kematian pada saat itu berarti hilangnya peluang untuk hidup yang lebih panjang. Semakin rendah tingkat kematian bayi, maka semakin tinggi Umur Harapan Hidup. Untuk menekan angka kematian bayi, diperlukan penolong persalinan yang memadai untuk menjamin proses persalinan yang aman dan benar.



Gambar 9. Persentase Persalinan menurut Penolong Persalinan Pertama di Kabupaten Soppeng, 2018-2022

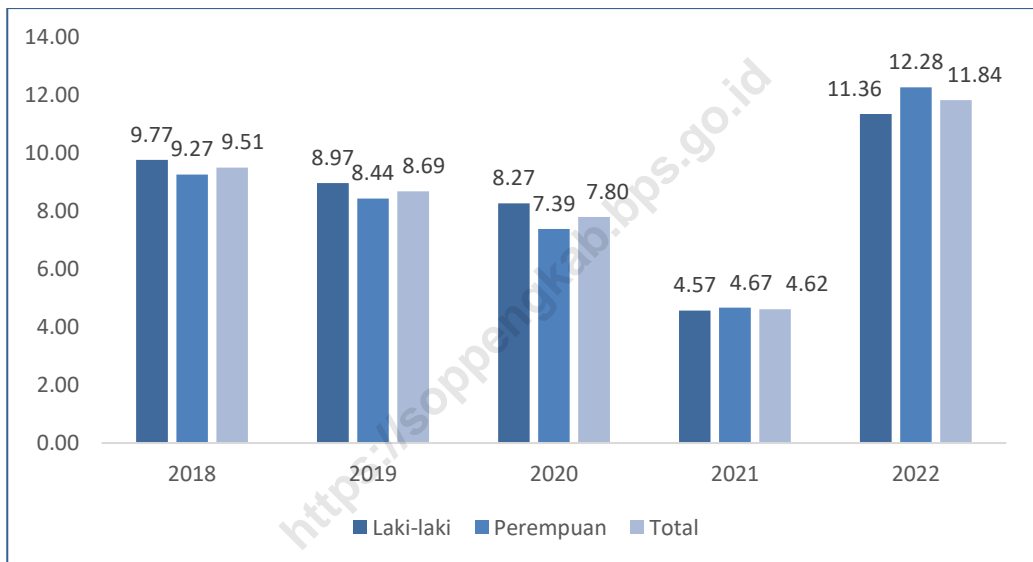
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022

Pada tahun 2018, 2020 dan 2022 dapat dikatakan bahwa seluruh persalinan perempuan umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan sudah ditolong oleh tenaga kesehatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada peningkatan layanan kesehatan untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak. Peningkatan layanan tersebut dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan salah satunya dengan cara mensosialisasikan fasilitas persalinan medis termasuk dengan mengadakan penyuluhan, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan bantuan tenaga medis untuk menolong persalinan mereka. Dengan pertolongan persalinan menggunakan tenaga medis diharapkan dapat menekan risiko kematian ibu dan bayi selama proses persalinan.

## **5.2. Status Kesehatan Masyarakat**

Kondisi kesehatan masyarakat pada suatu waktu dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan masyarakat pada umumnya. Status kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventif. Pola hidup tersebut juga sangat bergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadi pergeseran pola makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan sehingga menyebabkan perubahan tingkat produktivitas masyarakat. Untuk mengukur status kesehatan masyarakat digunakan indikator Angka Kesakitan/*Morbidity Rate*. Angka Kesakitan didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah maupun kegiatan sehari-hari terhadap keseluruhan penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Angka Kesakitan Kabupaten Soppeng pada tahun 2018-2021 mengalami tren penurunan yang cukup signifikan mulai dari 9,51 menjadi 4,62. Pada tahun 2022, Angka Kesakitan kembali meningkat drastis menjadi 11,84. Hal ini berarti bahwa banyaknya penduduk Kabupaten Soppeng yang mengalami gangguan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari dari tahun 2022 mengalami peningkatan dan atau dengan kata lain tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

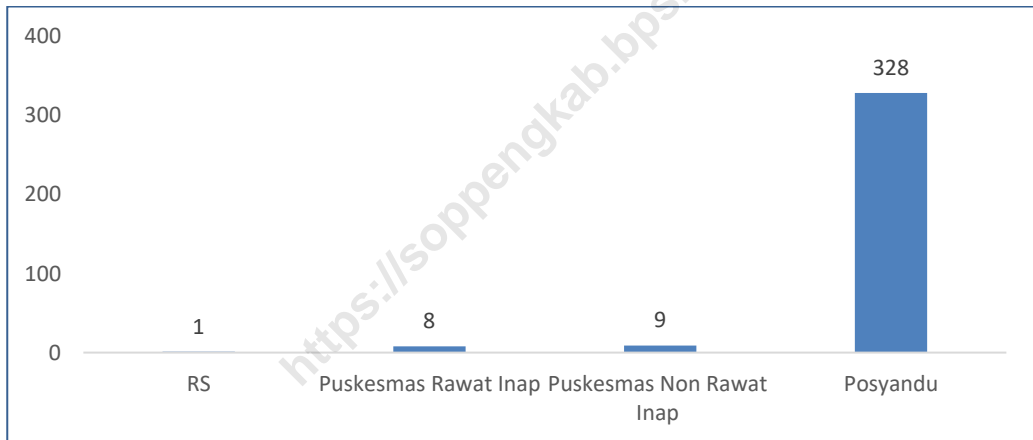


Gambar 10. Angka Kesakitan (Morbidity Rate) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2022

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022

### 5.3. Status Kesehatan Masyarakat

Tersedianya fasilitas kesehatan yang baik, murah dan terjangkau oleh semua kalangan adalah salah satu prasyarat tercapainya masyarakat yang sejahtera. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sampai wilayah terpencil dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk yang tidak mampu, tentunya sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Di Kabupaten Soppeng, terdapat sebanyak 1 unit Rumah Sakit Umum, 17 unit puskesmas yang terdiri dari 8 puskesmas rawat inap dan 9 puskesmas non rawat inap, dan dan 328 unit posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan.

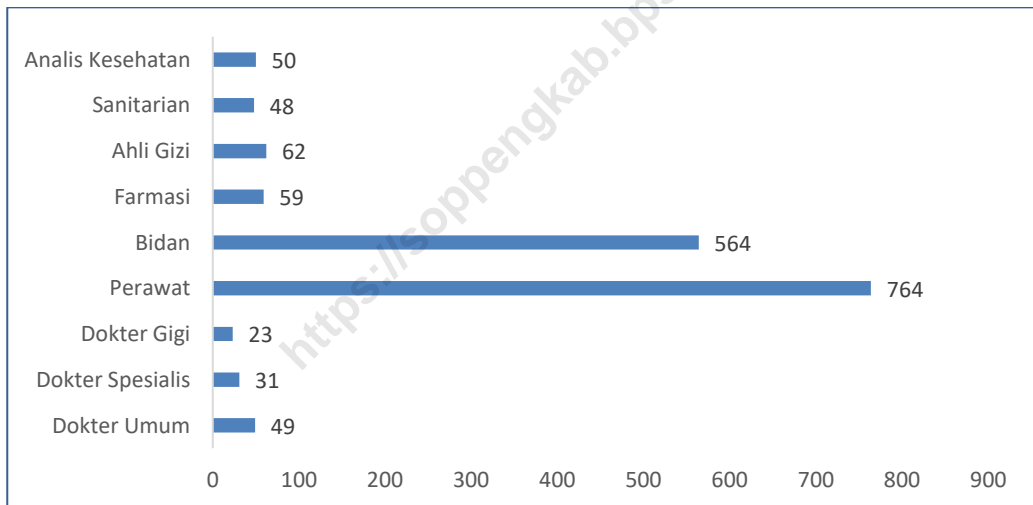


Gambar 11. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng, 2022

Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka 2023

## 5.4. Tenaga Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia selain harus memiliki sarana dan perlengkapan yang memadai, perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan yang baik pula. Kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan sangat tergantung pada kualitas tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan tersebut. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.



Gambar 12. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Soppeng, 2022

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2023

Pada tahun 2022, di Kabupaten Soppeng terdapat sebanyak 49 orang dokter umum, 31 orang dokter spesialis dan 23 orang dokter gigi yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain dokter, tenaga kesehatan yang membantu memberikan pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Soppeng antara lain 764 orang perawat, 564 orang bidan, 59 tenaga farmasi, 62 ahli gizi, 48 sanitarian dan 50 analis kesehatan. Dengan adanya para tenaga kesehatan tersebut, diharapkan status kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng akan terus mengalami peningkatan.

<https://soppengkab.bps.go.id>





# BAB VI PERUMAHAN

<https://soppentekn.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

## **Bab VI**

### **Perumahan**

Salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang adalah papan/rumah tempat tinggal. Perumahan sebagai sarana berlindung dan tempat tinggal bagi keluarga merupakan keperluan yang harus tersedia sekalipun tidak harus memilikinya. Selain sebagai tempat berlindung dan mempertahankan diri dari kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, rumah tempat tinggal juga dapat menunjukkan gaya hidup dan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berbanding lurus dengan kualitas/kondisi rumahnya. Semakin tinggi status sosial maka semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

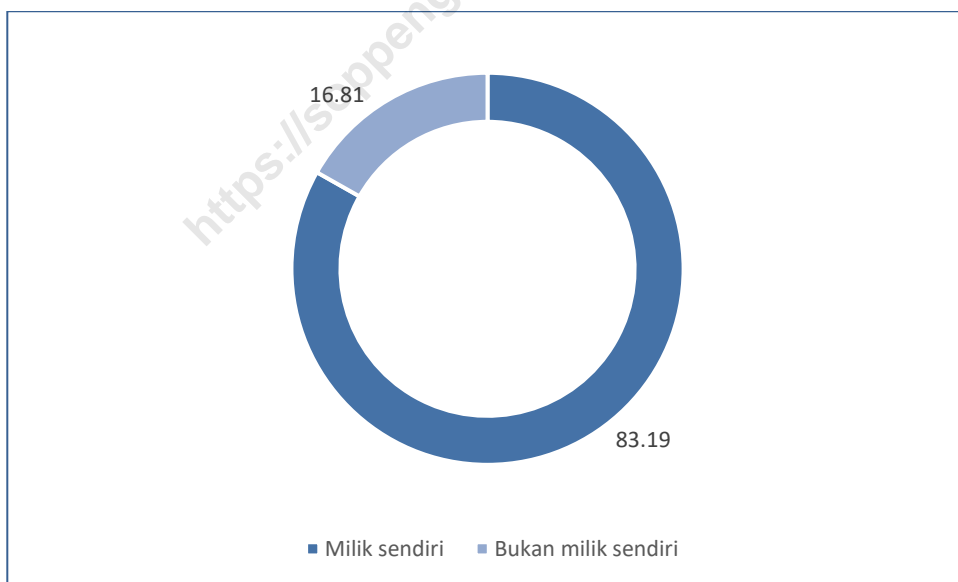
Kualitas tempat tinggal atau perumahan ditentukan oleh fisik rumah tersebut yang dapat terlihat dari kondisi fasilitas yang ada di dalamnya, antara lain penguasaan tempat tinggal, lantai rumah (luas dan jenis), jenis dinding dan atap, fasilitas penerangan, sumber air minum, serta fasilitas buang air besar (jenis dan tempat penampungan tinja). Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kebijakan pemerintah di bidang perumahan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara mengadakan dan meningkatkan mutu fisik dan fasilitas lingkungan perumahan termasuk bentuk, ukuran/tipe rumah, dan bahan bangunan yang digunakan. Kebijakan ini berhadapan dengan faktor-faktor yang ada dalam masyarakat seperti pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, kemampuan masyarakat yang terbatas dan biaya pembangunan perumahan yang semakin besar. Salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah yaitu menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

Pemukiman merupakan bagian penting di dalam usaha pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan produktivitas dengan penyediaan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang sehat, air yang bersih dan lingkungan yang sehat serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk menggambarkan kualitas perumahan dan lingkungan tersebut, BPS menggunakan pendekatan rumah tangga yang menempati suatu bangunan.

### 6.1. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tempat tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



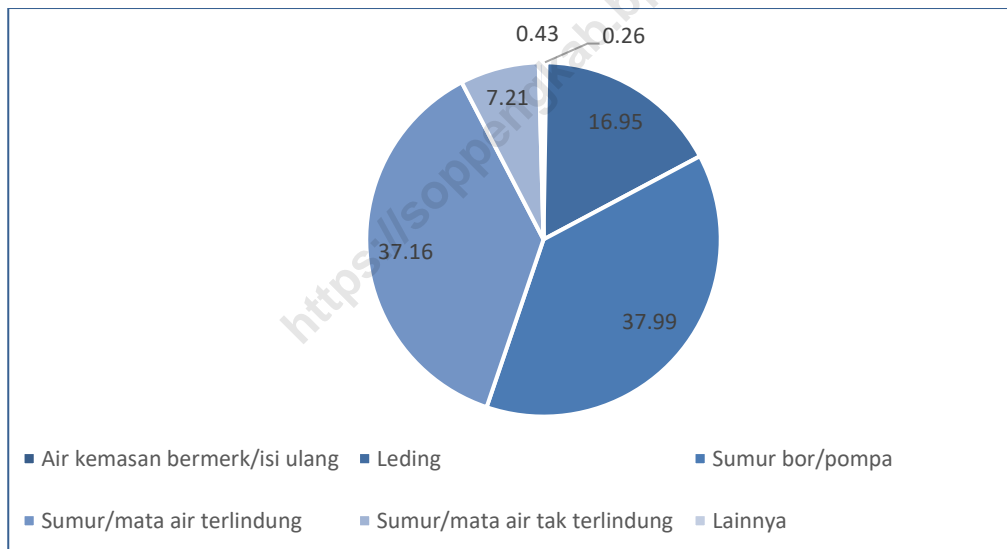
Gambar 13. Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Soppeng Tahun 2022

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Pada tahun 2022, hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Soppeng telah memiliki rumah sendiri, persentasenya mencapai 83,19 persen. Sisanya, sebesar 16,81 persen menempati bangunan dengan status bebas sewa, kontrak/sewa, dan lainnya.

## 6.2. Sumber Air

Air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme dalam tubuh manusia, selain itu air juga dibutuhkan untuk membersihkan, mandi, mencuci pakaian dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan rumah tangga adalah keberadaan sumber air yang digunakan.

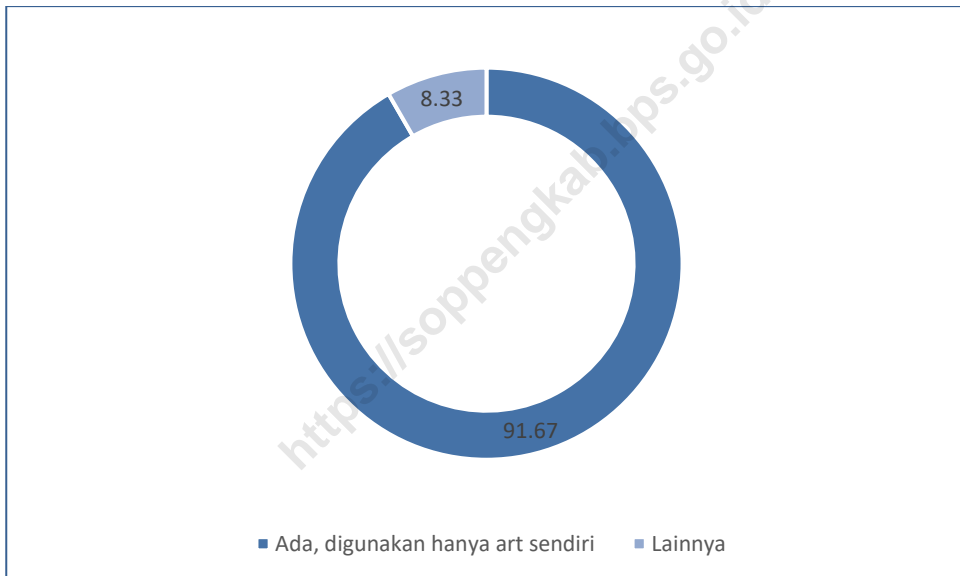


Gambar 14. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Soppeng, 2022  
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Berdasarkan Gambar 14, apabila dirinci menurut jenis sumber airnya, pada tahun 2022 sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Soppeng untuk mandi, mencuci dan lain-lain adalah jenis sumur bor/pompa, yaitu sebesar 37,16 persen. Sumber air lain yang persentasenya di atas sepuluh persen adalah Air Leding.

### 6.3. Fasilitas Buang Air Besar

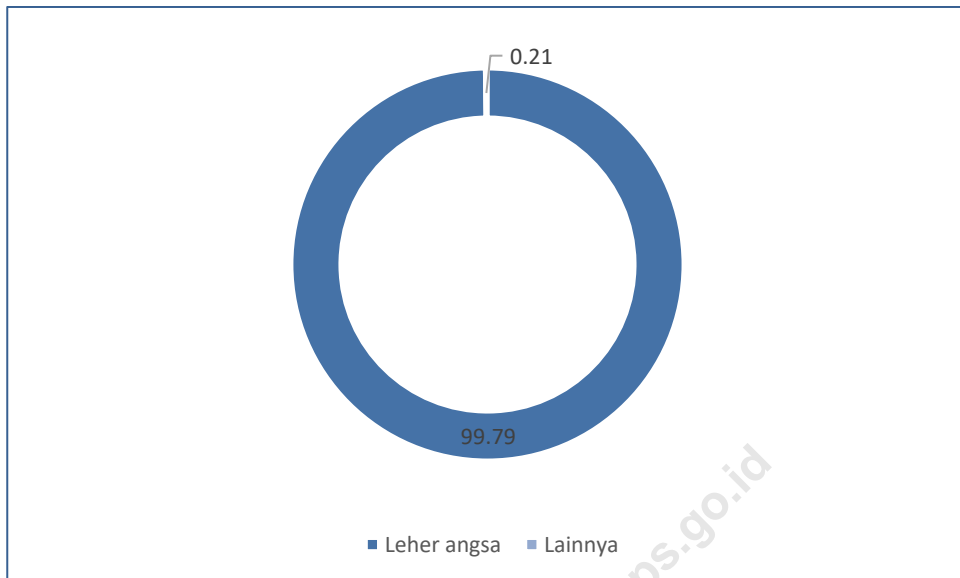
Sistem pembuangan sangat erat kaitannya dengan kondisi sanitasi lingkungan dan risiko penularan penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Masalah sanitasi lingkungan tidak terlepas dari aspek kepemilikan sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana tersebut. Fasilitas rumah tangga yang berhubungan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan menjadi empat kategori yaitu sendiri, bersama, umum dan tidak ada.



Gambar 15. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Buang Air Besar yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2022

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Berdasarkan Gambar 15 dapat diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Soppeng sudah memiliki fasilitas buang air besar sendiri di rumahnya, persentasenya sebesar 91,67 persen. Meskipun begitu, masih ada rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar bersama, umum, tidak menggunakan fasilitas buang air besar yang tersedia, bahkan ada yang tidak memiliki fasilitas buang air besar.

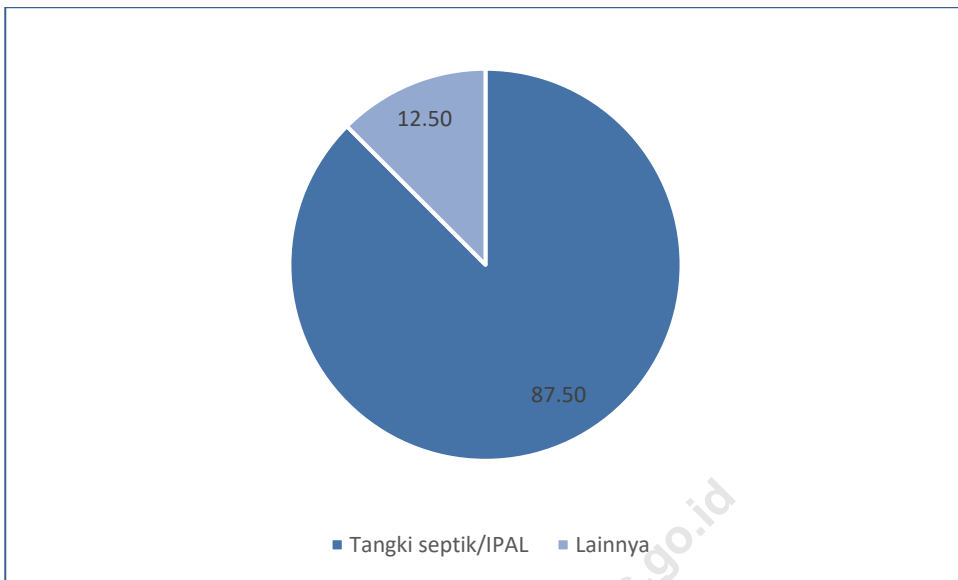


Gambar 16. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Fasilitas Buang Air Besar yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2022

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Fasilitas buang air besar dianggap memenuhi syarat kesehatan apabila kloset yang digunakan berjenis leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

Berdasarkan fasilitas buang air besar rumah tangga di Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 sudah menunjukkan kondisi yang baik yakni sebanyak 99,79 persen rumah tangga di Kabupaten Soppeng menggunakan kloset jenis leher angsa. Sementara itu jika dilihat berdasarkan tempat penampungan tinja, jenisnya dapat dibedakan menjadi tangki septik, IPAL, kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya. Pemanfaatan tempat pembuangan akhir tinja di Kabupaten Soppeng dapat dilihat di Gambar 17.



Gambar 17. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Tinja yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2022  
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Berdasarkan Gambar 17, di Kabupaten Soppeng, sudah banyak rumah tangga yang menggunakan tangki septik, persentasenya mencapai 87,5 persen. Tempat penampungan tinja yang berada di area terbuka dikatakan tidak sehat karena cenderung lebih mudah menimbulkan penyebaran penyakit bagi lingkungan di sekitarnya, khususnya penyakit saluran pencernaan.





# BAB VII LAIN-LAIN

<https://soppengraha.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

## **Bab VII**

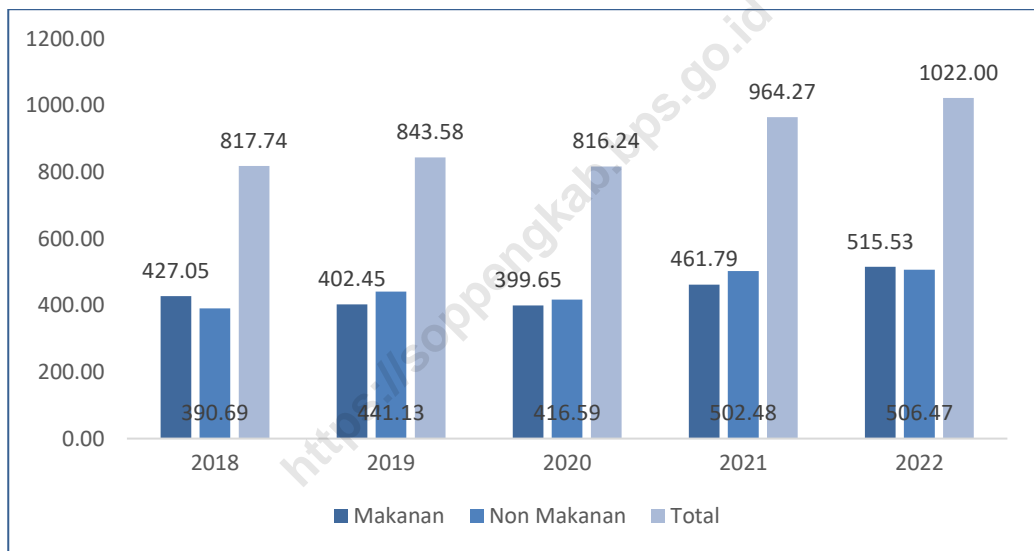
### **Lain-Lain**

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Data tentang penghasilan/pendapatan penduduk sangat sulit diperoleh, sehingga pendekatan yang sering digunakan oleh BPS dalam survei yaitu pendekatan pengeluaran rumah tangga. Hal tersebut dilakukan karena ada kecenderungan masyarakat memberikan jawaban mengenai pendapatan yang kurang akurat, sebaliknya penduduk cenderung memberikan jawaban yang jujur dan akurat apabila ditanyakan tentang pengeluaran konsumsi.

Data pengeluaran dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi rumah tangga secara umum melalui indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat dimana mereka berada. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk karena besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun nonmakanan tersebut secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

## 7.1. Pengeluaran per Kapita Sebulan dan Pola Konsumsi Penduduk

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat dari pola konsumsinya dan pengeluaran perkapita. Menurut Hukum Engel, apabila proporsi konsumsi makanan jauh lebih besar dibanding proporsi konsumsi nonmakanan menunjukkan bahwa taraf hidup penduduk tersebut tergolong masih rendah, karena mereka masih cenderung memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu dibanding kebutuhan nonpangan seperti sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.



Gambar 18. Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2022

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022

Apabila diamati pada gambar 18 di atas, pada tahun 2020 pengeluaran perkapita mengalami penurunan baik untuk konsumsi makanan maupun nonmakanan. Pola konsumsi di tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan bahwa pengeluaran nonmakanan lebih besar daripada pengeluaran makanan.

## 7.2. Penduduk Miskin

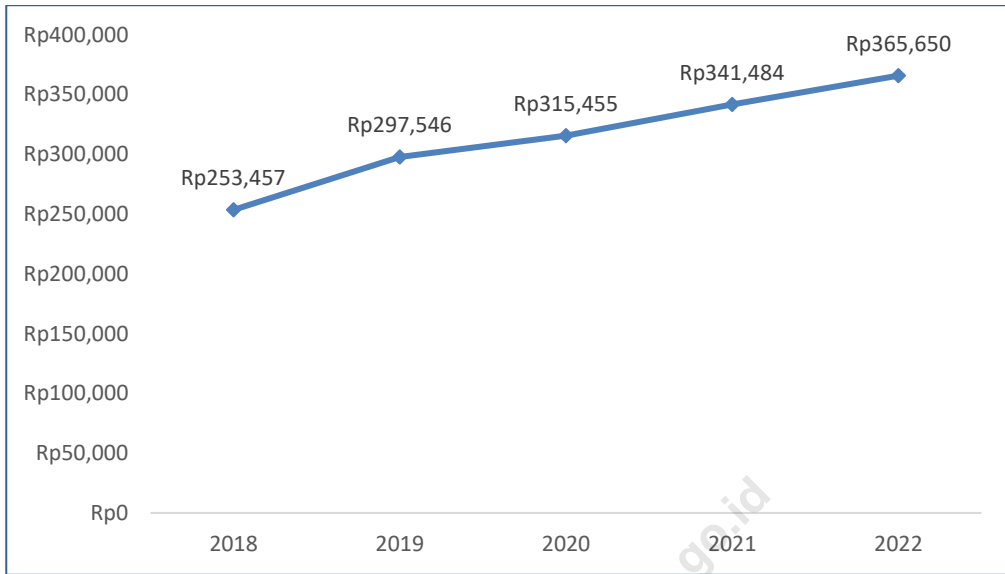
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Pembahasan di sini hanya dibatasi pada kemiskinan absolut yang datanya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran minimum makanan (setara 2100 kkal/hari) yang diwakili 52 komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, buah-buahan, minyak, dan lain-lain), sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diwakili oleh 51 komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

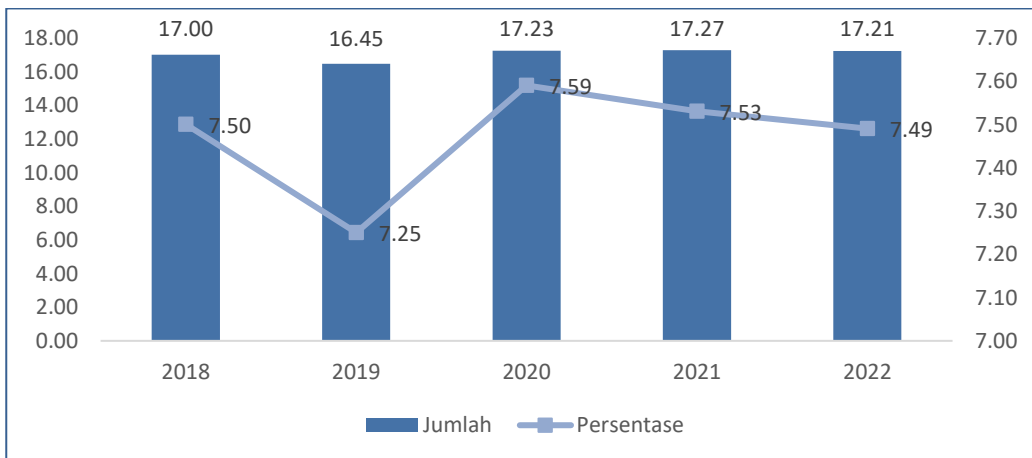
Selama kurun waktu 2018-2022, Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng selalu mengalami kenaikan.



Gambar 19. Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng, 2018-2022

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022

Pada tahun 2022 nilai Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng mencapai Rp365.650,-, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin mengalami naik turun yang tidak terlalu signifikan selama lima tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan di tahun 2019, persentase penduduk miskin kembali meningkat di tahun 2020 dan kembali melandai hingga tahun 2022.



Gambar 20. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng, 2018-2022

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018-2022

Pada tahun 2021, meskipun jumlah penduduk meningkat, tetapi persentase penduduk miskin mengikuti pola jumlah penduduk miskin yang cenderung menurun. Selama tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin menurun mulai dari 7,59 hingga 7,49.

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>





# LAMPIRAN

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

## Lampiran

Lampiran 1. Beberapa Indikator Kependudukan Kabupaten Soppeng, 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk (Ribu Jiwa)	234,75	235,96	237,12	238,24
• Laki-Laki	113,08	113,81	114,51	115,18
• Perempuan	121,67	122,15	122,61	123,06
Rasio Jenis Kelamin	92,94	93,17	93,39	93,60
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)				
• 2020-2021	-	0,52	-	-
• 2021-2022	-	-	0,49	-
• 2022-2023	-	-	-	0,47
Penduduk menurut Kelompok Umur (Ribu Jiwa)				
• 0-14	15,46	16,17	16,82	17,35
• 15-64	161,58	162,20	162,72	163,11
• 65+	26,00	26,62	27,27	27,92
Angka Beban Ketergantungan	25,66	26,38	27,10	27,75
Jumlah Kecamatan	8	8	8	8
Jumlah Desa/Kelurahan	70	70	70	70
Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	1 500	1 500	1 500	1 500

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2035  
 Hasil Sensus Penduduk

Lampiran 2. Indikator Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Partisipasi KB Wanita Umur 15-49 tahun (Persen)					
Pernah Menggunakan	21,12	19,81	22,84	19,81	19,83
Sedang Menggunakan	40,45	40,56	41,99	40,56	42,52
Tidak Pernah Menggunakan	38,43	39,63	35,17	39,63	37,65

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022

<https://soppengkab.bps.go.id>

Lampiran 3. Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Soppeng, 2019/2020-2022/2023

Indikator Pendidikan	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Jumlah Sekolah</b>				
• SD/Sederajat	273	272	272	275
• SMP/Sederajat	71	69	69	70
• SMA/Sederajat	37	31	31	33
<b>Jumlah Murid</b>				
• SD/Sederajat	21 384	21 055	20 638	20 117
• SMP/Sederajat	10 718	10 192	10 262	10 538
• SMA/Sederajat	9 906	9 908	9 681	9 587
<b>Jumlah Guru</b>				
• SD/Sederajat	2 952	2 821	2 791	2 792
• SMP/Sederajat	1 513	1 215	1 280	1 244
• SMA/Sederajat	1 141	913	934	936
<b>Rasio Murid Guru</b>				
• SD/Sederajat	7,24	7,46	7,39	7,21
• SMP/Sederajat	7,08	8,39	8,02	8,47
• SMA/Sederajat	8,68	10,85	10,37	10,24
<b>Rasio Murid Sekolah</b>				
• SD/Sederajat	78,33	77,41	75,88	73,15
• SMP/Sederajat	150,96	147,71	148,72	150,54
• SMA/Sederajat	267,73	319,61	312,29	290,52
<b>Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (Persen)</b>				
• Tidak Punya Ijazah SD	22,01	20,65	17,06	-
• SD/Sederajat	27,64	30,6	28,15	-
• SMP/Sederajat	17,32	16,53	19,84	-
• SMA/Sederajat ke Atas	33,02	32,22	34,95	-
<b>Angka Partisipasi Sekolah (Persen)</b>				
• 7-12	99,46	99,35	99,19	-
• 13-15	95,38	95,03	92,02	-
• 16-18	77,96	78,22	77,72	-

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019-2022 dan Kabupaten Soppeng dalam Angka 2021-2023

Lampiran 4. Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Fasilitas Kesehatan			
• Rumah Sakit Umum	1	1	1
• Puskesmas	17	17	17
• Posyandu	328	328	328
Angka Harapan Hidup/ Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	69,65	69,81	70,20
Penolong Persalinan Pertama (Persen)			
• Tenaga Medis	100	99,57	100

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

Lampiran 5. Beberapa Indikator Perumahan Kabupaten Soppeng, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Penggunaan Jenis Kloset Rumah Tangga (Persen)			
• Leher Angsa/ Plengsengan	99,75	99,53	99,79
• Lainnya	0,25	0,47	0,21
Tempat Pembungan Akhir Tinja (Persen)			
• Tangki/IPAL	72,91	77,50	87,50
• Bukan Tangki/IPAL	27,09	22,50	12,50

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

<https://soppengkab.bps.go.id>

Lampiran 6. Beberapa Indikator Lainnya Kabupaten Soppeng, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah)			
• Makanan	399.650	461 791	515 531
• Bukan Makanan	416.590	502 479	506 470
• Total Pengeluaran	816.240	964 270	1 022 001
Pola Konsumsi Penduduk (Persen)			
• Makanan	48,96	47,89	50,44
• Non Makanan	51,04	52,11	49,56
Penduduk Miskin (Persen)	7,59	7,53	7,49
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	17,23	17,27	17,21

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022





# DATA MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG  
JL. SALOTUNGO NO. 127 WATANSOPPENG 90812  
KABUPATEN SOPPENG  
TELP. (0484) 21060 EMAIL: SOPPENGKAB@BPS.GO.ID